

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Pustaka dan Teori

a. Identitas Gender

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian gender tidak dipisahkan dengan pengertian jenis kelamin (*sex*), di mana perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri fisiknya. Dalam pandangan kaum feminis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya didasarkan pada ciri fisiknya saja, tetapi juga pada perbedaan posisi ekonomi yang diberikan pada masing-masing jenis kelamin.

Perbedaan posisi ekonomi menunjuk kepada peranan apa yang diletakkan pada orang, baik pria maupun wanita, dalam proses atau pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah tangga (misalnya dengan norma: menurut kekuatan atau kecakapan bekerja masing-masing khususnya dalam pekerjaan mencari nafkah), yang umumnya erat terjalin dengan lain-lain fungsi (Pudjiwati Sajogyo, 1983: 28).

Pria yang dianggap kuat, tegas, dan mampu menjaga dirinya sendiri memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan diri di sektor publik, sedangkan wanita yang oleh masyarakat dianggap lemah lembut, bersifat keibuan, dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri diwajibkan untuk bekerja sebatas sektor domestik saja. Perbedaan peranan tersebut melahirkan perbedaan gender, yang kemudian menciptakan identitas gender bagi laki-laki maupun perempuan. Hal-hal yang sudah melekat sebagai identitas wanita, dianggap tabu apabila dilakukan oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya.

Identitas gender adalah perbedaan ciri, peran, kedudukan, dan sifat-sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Trisakti dan Sugiarti, 2008: 5).

Pengetahuan dan pemahaman tentang *gender identity* (identitas gender) seseorang telah didapatkan sejak dini. Bayi-bayi yang baru lahir sudah diperkenalkan mengenai identitas gender mereka, apakah mereka termasuk laki-laki atau perempuan. Proses pengenalan berawal dari hal-hal yang sederhana seperti pembedaan warna kamar dan baju, model pakaian, cara berbicara, cara berjalan, bahkan jenis mainan yang kesemuanya mencirikan pembedaan pria atau wanita. Sekitar usia dua tahun, anak telah menyadari gendernya dan dapat memberi tahu kita bahwa mereka adalah wanita atau lelaki. Menjelang usia 4-5 tahun, anak dapat dengan tepat memberi label orang lain berdasarkan gendernya (Selley E. Taylor, dkk, 2009: 425).

Setelah beranjak dewasa, ia akan berusaha menunjukkan identitas gendernya melalui perilaku nonverbal maupun verbal. Ketika berinteraksi dengan orang lain seseorang akan berusaha mengontrol penampilan, perilaku dan cara berbicaranya, hal itu digunakan untuk

menyampaikan kesan tertentu mengenai dirinya sendiri. Meskipun terkadang orang menunjukkan perilaku seperti itu untuk menipu orang lain, pada umumnya orang menggunakannya untuk menyampaikan kesan dan perasaan mereka dalam situasi tertentu (Taylor, dkk, 2009: 77). Ketika seseorang berciri fisik laki-laki tetapi cara berpakaian, cara berbicara, dan tingkah lakunya menyerupai perempuan, ia akan dianggap menyimpang, begitu juga sebaliknya. Penyampaian kesan kepada orang lain terhadap dirinya ditujukan untuk menunjukkan identitas gender mereka, agar mereka tidak diberi label menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh masyarakat, mengenai apa yang harus dilakukan dan peranan mereka sebagai wujud identitas dirinya.

b. Keadilan Gender

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sedangkan keadilan berarti perbuatan atau perlakuan yang adil (Tim Redaksi, 2008: 10). Gender sendiri memiliki pengertian pemberian identitas apakah ia merupakan perempuan atau laki-laki berdasarkan apa yang ditetapkan oleh kultur. Keadilan gender merupakan suatu proses memberi keadilan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang terhadap laki-laki dan perempuan. Itu berarti tidak ada pembakuan peran, kedudukan, beban pekerjaan, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe terhadap laki-laki maupun perempuan.

Untuk menciptakan keadilan gender diperlukan pemenuhan atas kepentingan bersama, yang berguna untuk membantu perempuan yang

masih termarginalkan oleh kultur masyarakat setempat. Dalam konsep keadilan gender, baik pria maupun wanita berkewajiban untuk saling membantu di sektor pekerjaan masing-masing. Pembagian tugas antar-keduanya tidak didasarkan atas gender akan tetapi atas dasar atas kepentingan bersama, sehingga dapat merubah hubungan subordinasi atau hubungan yang bersifat atas-bawah antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang setara.

Keadilan gender juga dapat diperjuangkan melalui transformasi sosial. Transformasi sosial adalah semacam proses ciptaan hubungan fundamental baru dan lebih baik. Hubungan fundamental yang dimaksudkan di sini adalah struktur dari ekonomi yakni hubungan eksploratif menuju struktur pada eksploitasi, hubungan budaya hegemoni perlu dirubah menuju struktur politik yang nonrepresif, dari struktur gender yang mendominasi perempuan menuju struktur yang membebaskan (Mansour Fakih, 1996: 73). Perempuan tidak lagi dianggap sebatas “*konco wingking*” yang hak dan kewajibannya jauh berbeda dengan laki-laki. Laki-laki memiliki akses lebih banyak untuk dapat mengembangkan potensi diri, sedangkan perempuan hanya boleh bekerja di sektor domestik, yang membatasi mereka untuk mengembangkan bakatnya. Dalam konsep keadilan gender di sini, perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kualitas diri.

Eksistensi manusia ditinjau dari sudut gerakan pembebasan perempuan adalah makhluk peradaban yang merdeka, bebas, independen,

dan terlepas dari dalam materi, dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dalam suatu masyarakat (Nawal Al'Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, 2000: 109). Keadilan gender dapat terwujud ketika terjadi perubahan konsensus masyarakat dari budaya patriarkhi menuju kesetaraan gender. Baik perempuan maupun laki-laki dianggap sama, hal ini tidak berarti menentang apa yang sudah ditentukan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.

Tidak seluruh peran antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan, ada beberapa peran yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Seperti istri harus berbakti dan hormat kepada suami, dan suami harus bersikap lembut kepada istrinya. Keadilan gender di sini tidak sepenuhnya untuk mengubah peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan, hanya memperjuangkan bagaimana mencapai kesetaraan, sehingga dapat menghapus diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan.

Begitu pula dalam kepengurusan suatu organisasi, dibutuhkan keadilan gender untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Pembagian tugas-tugas dalam setiap pelaksanaan agenda Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Mesin semestinya tidak didasarkan perbedaan gender. Anggota laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu, baik sebagai pengurus, penanggung jawab, bahkan sebagai pemimpin. Begitu juga untuk memperoleh hak menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan

bersama, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bersifat adil dan setara antara perempuan dan laki-laki.

c. Gender dan Stereotipe atas Pekerjaan Perempuan

Stereotipe adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis pekerjaan tertentu (Trisakti Handayani dan Sugiarti, 2008: 16). Stereotipe dapat merugikan kelompok atau jenis pekerjaan yang diberi label buruk oleh kelompok lainnya, sehingga stereotipe termasuk salah satu bentuk ketidakadilan. Salah satu jenis stereotipe adalah pelabelan berdasarkan gender. Konstruksi budaya masyarakat yang menyosialisasikan perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki, secara tidak langsung juga dapat menimbulkan stereotipe-stereotipe pada masing-masing jenis kelamin. Pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, di mana mereka digambarkan sebagai manusia yang kuat, rasional, teguh pada pendirian, perkasa, dan tegas, sedangkan wanita diberi label sebagai makhluk yang lemah lembut, halus, emosional, dan keibuan.

Pelabelan merupakan hasil dari hubungan sosial, yang kemudian tidak hanya memberi stereotipe saja, tetapi juga berdampak pada pemberian peran dan tugas tertentu. Perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga (domestik), peluang dan kesempatan perempuan untuk keluar rumah sangat terbatas, dan ia tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Lain halnya dengan laki-laki yang mendapat pelabelan sebaliknya, mereka identik dengan pekerjaan di luar rumah (sektor publik) karena laki-laki

dianggap sebagai pemimpin, sehingga ia yang akan mengambil setiap keputusan, karena mereka juga yang akan memberi pertanggungjawaban atas apa yang mereka putuskan.

Bias gender yang mengakibatkan stereotipe diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan bahwa pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, oleh masyarakat dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan lelaki. Pekerjaan domestik dikategorikan pekerjaan yang tidak produktif sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara.

Sejak kecil laki-laki tidak diijinkan membantu pekerjaan ibu, mereka dididik untuk membantu pekerjaan ayah seperti berladang, memberi makan ternak, membajak sawah dan sebagainya. Kaum perempuan sudah diajarkan untuk menekuni pekerjaan rumah tangga, seperti membantu ibu memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Ketika dewasa, perempuan senang apabila ditinggal suami mereka bekerja di luar, karena mereka ingin tetap menjaga “nyala api yang membara” (di dapur) dan ini karena otak mereka berkembang untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka dalam kehidupan (Allan dan Barbara Pease, 2004: 7). Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural pelabelan terhadap perempuan dan laki-laki (stereotipe).

Jika seseorang melakukan stereotipe kepada orang lain, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan orang tersebut. Dia hanya mengetahui hal-hal yang bersifat umum dari suatu kategori yang

disifatkan kepada orang yang dilihat (Miftah Thoha, 2005: 165). Terkadang pada kenyataannya, orang-orang yang distereotipekan belum tentu benar-benar sama dengan pelabelan yang diberikan padanya. Pelabelan (stereotipe) sangat memengaruhi persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain. Dalam organisasi proses pelabelan sering terjadi, misalnya antara kelompok laki-laki dengan kelompok perempuan memiliki pelabelan yang mencirikan identitas masing-masing, dan tanpa disadari hal itu telah disepakati bersama.

d. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi adalah proses pemiskinan perempuan, di mana perempuan tidak memiliki akses dan kesempatan untuk dapat mengembangkan kualitas dirinya sendiri. Salah satu penyebab marginalisasi terhadap perempuan dikarenakan konstruksi budaya yang mengatur peranan sosial anggotanya. Peranan sosial antara laki-laki dengan perempuan dikonstruksikan masyarakat berdasarkan jenis kelaminnya.

Masyarakat menentukan apa yang pantas atau ideal yang harus diperankan oleh laki-laki dan perempuan. Ideologi gender inilah yang kemudian membagi peranan-peranan apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh jenis kelamin tertentu, dan kemudian dampaknya lebih merugikan perempuan sebab masyarakat menempatkan perempuan di kelas kedua. Seperti karena perempuan distereotipekan sebagai orang yang berbadan lemah dan patuh, maka mereka mendapat

gaji yang lebih rendah dari laki-laki. Mereka dipersepsikan sebagai orang yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka mereka tidak perlu turut dalam pengambilan keputusan tentang kebaikan bersama atau menggunakan hak-hak pilihnya (Irwan Abdullah, 1997: 283).

Perbedaan gender yang seperti ini dapat melahirkan ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum perempuan, serta dapat memmarginalkan kaum perempuan. Marginalisasi perempuan juga terjadi akibat keyakinan masyarakat, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan, dan kebijakan-kebijakan yang bias gender.

Adanya marginalisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dan telah disosialisasikan kepada generasinya sejak dulu dapat terbawa dalam kehidupan berorganisasi. Terlebih organisasi yang rawan bias gender seperti Organisasi Kemahasiswaan Jurusan Teknik Mesin, di mana jumlah pria lebih dominan dibanding jumlah wanita.

e. Gender dan Subordinasi Pekerjaan Perempuan

Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan politik. Pandangan yang bias gender seperti itu dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan berkewajiban untuk bekerja di dalam rumah, menyebabkan perempuan tidak bisa tampil di depan umum, sehingga masyarakat menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi akibat bias gender dapat terjadi di setiap tempat dan dari waktu ke waktu, apabila pada saat itu dan di tempat tersebut masih menganut budaya patriarkhi. Sering kali ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi, orang tua akan memilih untuk menyekolahkan anak laki-lakinya dari pada anak perempuan. Anak laki-laki diberi kepercayaan untuk memimpin rumah tangganya kelak, serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya, sehingga anak laki-laki perlu dibekali pendidikan setinggi-tingginya, sedangkan anak perempuan akan diminta putus sekolah dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Bagi masyarakat yang menganut budaya patriarkhi, anak perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, sebab setinggi apa pun pendidikannya mereka akan ikut suaminya, dan kelak hanya bertugas mengurus segala urusan rumah tangganya.

Sampai saat ini budaya patriarkhi tetap berlaku pada beberapa masyarakat, meskipun gerakan feminis untuk menyuarakan kesetaraan gender sudah meluas ke berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut dapat memengaruhi sistem politik di HIMA Mesin. Selain itu, banyaknya jumlah laki-laki dari pada perempuan semakin menguatkan kelanggengan budaya patriarkhi di Organisasi Kemahasiswaan Jurusan Teknik Mesin. Laki-laki yang mendominasi dapat merasa malu ketika mereka harus dipimpin seorang perempuan.

f. Fungsional dan Disfungsional

Robert Merton berpendapat bahwa struktur dan bentuk dari sosial kultural tidak hanya memiliki fungsi positif (fungsional), tetapi juga memiliki fungsi negatif (disfungsional). Keadaan ini terjadi ketika struktur dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya bagian lain sistem sosial, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi bagian-bagian lainnya.

Misalnya saja pada masyarakat yang masih menganut ideologi patriarkhi dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat patriarkhi membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kedudukan, kelas, dan status mereka dalam masyarakat. Perempuan didiskriminasikan dan ditempatkan pada kelas yang lebih rendah dari pada laki-laki. Hal itu dikarenakan adanya pandangan bahwa laki-laki memiliki superioritas terhadap perempuan, dan memiliki *privilege* yang lebih. Status quo yang diberikan masyarakat patriarkhi kepada laki-laki membuat kaum perempuan menjadi tertindas. Perempuan terdominasi oleh laki-laki, hak-hak yang dimiliki perempuan tidak setara dengan yang dimiliki laki-laki.

Struktur dan bentuk dari budaya patriarkhi terus ada dalam masyarakat, karena laki-laki yang berada pada posisi dominan akan berusaha mempertahankan *status quo* mereka. Robert Merton mengatakan bahwa, suatu struktur bisa jadi disfungsional bagi sistem secara keseluruhan namun mungkin saja terus ada (Ritzer, Goerge dan Douglas J. Goodman, 2010: 272). Meski struktur tersebut menimbulkan dampak negatif atau disfungsional pada salah satu kelompok, namun

akan tetapi dipertahankan oleh orang-orang yang merasa mendapatkan keuntungan.

g. Interseksionalitas

Patricia Hill Collins memandang bahwa penindasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat intensitas yang berbeda-beda, tergantung pada interseksi tatanan ketimpangan. Inti dari teori interseksionalitas adalah memahami tatanan ketimpangan ini sebagai struktur hierarkis yang didasarkan pada hubungan yang tidak adil. Pandangan mendasar teori interseksionalitas yaitu hak istimewa yang dimiliki laki-laki dapat berubah menjadi penindasan perempuan. Adanya penindasan terhadap perempuan karena status quo yang diberikan kepada laki-laki, sehingga laki-laki merasa dapat mendominasi kaum perempuan yang dianggap lebih lemah dari pada mereka.

Teori interseksionalitas mengakui kaitan fundamental antara ideologi dengan kekuasaan yang memungkinkan pihak yang mendominasi mengendalikan subordinat dengan menciptakan politik yang di dalamnya perbedaan menjadi alat konseptual untuk menjustifikasi tatanan penindasan (Ritzer, Goerge dan Douglas J. Goodman, 2010: 516).

Dalam kehidupan masyarakat patriarkhi, pihak yang mendominasi (laki-laki) menggunakan perbedaan antara maskulinitas yang dimiliki laki-laki dengan femininitas yang dimiliki perempuan, untuk menciptakan stereotipe-stereotipe tertentu. Maskulinitas distereotipkan sebagai sifat yang lebih bijaksana, kuat, tegas, dan mampu bertanggung jawab, sehingga laki-laki yang diidentikkan dengan sifat tersebut memiliki hak istimewa untuk menjalankan roda kehidupan masyarakat.

Lain halnya dengan feminimitas, di mana sifat tersebut dipandang lemah, manja, tidak bisa mandiri, dan tidak dapat mengemban tanggung jawab besar. Perempuan sebagai kelompok yang dilekatkan pada feminimitas dipandang tidak mampu mengendalikan sektor publik, sehingga ruang gerak mereka hanya terbatas pada tatanan sektor domestik.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi karena masyarakat patriarkhi menggunakan perbedaan maskulinitas dan feminimitas menjadi model dari superioritas dan inferioritas. Masyarakat tersosialisasi untuk berhubungan satu sama lain tidak menggunakan perbedaan untuk saling melengkapi, tetapi secara evaluatif dinilai mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk.

h. Feminisme

Feminisme mengatakan bahwa situasi yang dialami perempuan dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga perempuan menjadi tertindas. Feminisme berupaya memperjuangkan nasib kaum perempuan, yang dilandasi oleh kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Gagasan feminism ini menyebar luas di berbagai negara dan kemudian melahirkan gerakan feminism. Gerakan feminism di Indonesia dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Sesuai dengan tradisi di mana Kartini hidup dan dibesarkan, ia menyadari adanya perlakuan tidak adil hanya karena ia dilahirkan sebagai perempuan. Meskipun Kartini tidak pernah memakai

istilah “gender”, aspirasinya mencerminkan bagaimana ia mendambakan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat (Saparinah Sadli, 2010: 42).

Sampai saat ini beberapa orang atau kelompok tertentu masih berprasangka bahwa feminism adalah gerakan pemberontakan terhadap laki-laki, perempuan berusaha mengingkari kodrat yang menentukan kedudukan, peran, dan fungsi mereka. Kesalahan dalam memahami apa yang disebut feminism, menyebabkan gerakan perempuan kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum ditolak oleh masyarakat. Perlu dibahas lebih rinci apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan feminism, agar masyarakat dapat menyadari pentingnya kesetaraan dan keadilan gender. Terdapat beberapa aliran feminism yang berkembang, antara lain:

1) Feminisme Liberal

Aliran ini berasumsi bahwa akar dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan rasionalitas mereka. Kemampuan rasionalitas perempuan dipandang lebih lemah dari pada laki-laki, sehingga perempuan tersubordinasi dan tertindas di berbagai aspek kehidupan. Hal ini disebabkan karena perbedaan akses dan kesempatan antara perempuan dan laki-laki, baik dalam pendidikan, proses pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Gerakan feminism liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif, yaitu peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pemberian untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali bagi perempuan, baik di dalam akademi, forum, maupun pasar (Tong, Rosemarie Putnam, 2006: 48-49).

Aliran feminis ini menekankan bahwa masyarakat yang menganut sistem patriarkhi, masih mencampuradukkan antara seks dan gender, dan menganggap bahwa hanya pekerjaan-pekerjaan yang dilekatkan dengan kepribadian feminim yang layak untuk perempuan. Pekerjaan yang pantas dilakukan perempuan adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu menggunakan tenaga besar, dan mengharuskan mempergunakan perasaan. Seperti menjadi perawat, guru, dan mengasuh anak. Perempuan dianggap tabu ketika mengerjakan pekerjaan yang bersifat maskulin.

Gerakan ini berusaha membebaskan perempuan dan laki-laki dari kandang feminitas dan maskulinitas yang dikonstruksikan secara sosial budaya, melalui pendidikan yang ditujukan pada seluruh masyarakat yang masih menganut prinsip patriarkhi. Kaum feminism liberal menggunakan pendekatan *androgini* untuk melawan kecenderungan masyarakat yang sangat menghargai sifat maskulin, dan merendahkan sifat feminim. Aliran ini mendorong masyarakat untuk mengembangkan dengan baik sifat positif maskulin dan feminim, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki alasan untuk merendahkan sisi feminimnya dari pada sisi maskulinnya. Kaum feminism liberal bersandar pada keyakinan bahwa (Ritzer, Goerge dan Douglas J. Goodman, 2010: 499),

- a) Seluruh umat manusia memiliki ciri tertentu, yaitu kemampuan menggunakan akal, agensi moral, dan aktualisasi diri

- b) Penggunaan kemampuan dapat dilakukan melalui pengakuan legal atas hak-hak universal
- c) Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan karena persoalan jenis kelamin, adalah konstruksi sosial yang tidak berdasar pada “(hukum) alam”
- d) Perubahan sosial bagi kesetaraan dapat dihasilkan oleh seruan terorganisasi bagi publik untuk menggunakan akalnya dan penggunaan kekuasaan negara

2) Feminisme Radikal

Aliran ini berpendapat bahwa penindasan yang dialami perempuan berakar dari sistem budaya patriarkhi, di mana laki-laki memiliki *privilege* terhadap kekuasaan dan ekonomi yang lebih besar dibanding perempuan. Laki-laki sebagai kategori sosial yang dianggap “tinggi”, mampu mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang dianggap “lebih rendah”. Kaum laki-laki merasa diuntungkan dengan adanya marginalisasi terhadap perempuan. Jaggar menyebutkan bahwa dalam aliran ini, jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik, dan psikologis, serta kepentingan dan nilai-nilainya (Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, 1997: 48).

Kaum feminis radikal menyoroti dua konsep utama, yaitu patriarkhi dan seksualitas. Istilah patriarkhi digunakan oleh Max

Weber untuk mengacu pada sistem sosial politik tertentu, di mana laki-laki (kepala rumah tangga) bisa mendominasi anggota keluarganya, dan mendominasi produksi ekonomi dari keluarga tersebut. Kate Millett (dalam Ratna Saptari dan Brigette Holzner, 1997: 49) mengatakan bahwa hubungan patriarkal sebenarnya tidak hanya terbatas pada arena kekerabatan saja, tetapi juga pada semua arena kehidupan manusia, seperti ekonomi, politik, keagamaan, dan seksualitas. Kaum feminism radikal berusaha membongkar struktur sistem budaya patriarkhi dengan cara melibatkan langsung peran perempuan dalam kehidupan politik dan sosial. Tujuan dari program ini agar perempuan ikut berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

3) Feminisme Marxis

Kaum feminis Marxis lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan perempuan. Aliran ini berasumsi bahwa penindasan yang dialami perempuan bersumber dari eksplorasi kelas dalam tataran sistem produksi, di mana pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Angels (dalam Rosemarie Putnam Tong, 2006: 154) menyatakan bahwa di dalam kelompok, perempuan dibebani pekerjaan pengurusan rumah tangga, sementara laki-laki menyediakan makanan dan melakukan pekerjaan produktif.

Pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada perempuan, seperti menjahit, mengasuh anak, memasak, dan sebagainya,

dikatakan sebagai pekerjaan nonproduktif, sehingga tidak dihitung dalam statistik ekonomi. Berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, di mana pekerjaan itu dapat menghasilkan upah dianggap pekerjaan produktif, dan terhitung dalam statistik perekonomian.

Bagi kaum feminis Marxis, fungsi dan sifat pekerjaan perempuan di bawah kapitalisme adalah peremehan terhadap perempuan. Hanya karena pekerjaan ini tidak memperoleh upah, sehingga dipandang rendah dan tidak diperhitungkan dalam ekonomi. Perempuan semakin dianggap sebagai konsumen semata, seolah-olah peran laki-laki adalah untuk menghasilkan upah, sementara peran perempuan adalah menghabiskannya untuk “produksi yang tepat dari industri kapitalis” (Tong, Rosemarie Putnam, 2006: 157). Padahal pekerjaan yang dibebankan pada perempuan adalah pekerjaan yang berat, dan memiliki fungsi penting secara sosial.

Agenda yang dilakukan oleh feminis Marxis adalah sosialisasi pekerjaan perempuan. Pentingnya sosialisasi pekerjaan perempuan bukan berarti membebaskan perempuan dari pekerjaan rumah tangga, tetapi untuk menyadarkan setiap orang mengenai betapa pentingnya pekerjaan itu secara sosial. Ketika masyarakat telah menyadari betapa sulit dan pentingnya pekerjaan rumah tangga, masyarakat tidak lagi memiliki dasar memandang perempuan sebagai orang yang bersifat parasit dan bernilai inferior.

4) Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis berasumsi bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada tatanan pertentangan kelas, tetapi juga adanya sistem patriarkhi. Di mana sesuatu yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang bersifat alamiah, instinktif, dan kodrat, ternyata dibentuk oleh konteks sosial dan politik yang berlaku di wilayah setempat. Aliran ini berfokus pada keanekaragaman bentuk patriarkhi dan pembagian kerja seksual, karena kedua hal ini tidak bisa dilepaskan dari pola kehidupan masyarakat. Kaum feminism sosialis mengatakan bahwa keanekaragaman bentuk patriarkhi terjadi karena pengalaman individu atau kelompok sosial tertentu, tergantung pada faktor gender, kelas, ras individu atau kelompok tersebut (Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, 1997: 52).

Feminisme sosialis berpendapat pembebasan perempuan bergantung pada penghapusan sistem kapitalisme. Mereka mengklaim bahwa kapitalisme tidak dapat dihancurkan kecuali patriarkhi juga dihancurkan, dan bahwa hubungan material ekonomi manusia tidak dapat berubah kecuali jika ideologi mereka juga berubah (Tong, Rosemarie Putnam, 2006: 175). Agenda yang dijalankan oleh feminis sosialis adalah membantu kesadaran kelas,

dan meningkatkan kualitas dan kuantitas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan.

i. Pembagian Kerja Seksual

Individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatannya ditentukan oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern berasal dari kemauan dan kemampuan pribadi dalam melaksanakan suatu tindakan, sedangkan faktor ekstern berasal dari norma sosial yang telah ditentukan, baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berinteraksi secara dinamis. Arah dasar interaksi ini adalah menciptakan nilai, norma, atau standar tingkah laku yang mengatur setiap individu, dan menentukan sanksi atas pelanggaran norma yang telah disepakati. Dalam masyarakat patriarkhi, norma-norma moral, sosial, dan hukum pun lebih banyak memberi hak kepada laki-laki daripada perempuan, justru karena alasan bahwa laki-laki memang “lebih bernilai” secara publik daripada perempuan (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 2002: 35).

Lingkungan masyarakat patriarkhi menggolongkan sifat-sifat kepribadian seperti aktif, tegas, tanggung jawab, mandiri, perilaku asertif, dan kompetitif sebagai ciri-ciri maskulin, sedangkan sifat pasif, manja, irrasional, emosional, tergantung pada orang lain, dan sensitif sebagai sifat feminim. Maskulinitas dipandang lebih tinggi dari pada feminitas, kondisi ini digolongkan sebagai sikap seksis. Implikasinya, pembagian pekerjaan berdasarkan seksualitas seseorang. Pekerjaan-pekerjaan

penting yang membutuhkan ketegasan, ketepatan, kekuatan, dan tanggung jawab diberikan kepada kaum laki-laki, sebab pekerjaan itu sangat lekat dengan sifat maskulinitas. Pekerjaan perempuan cenderung tidak memerlukan tanggung jawab besar, kekuatan, dan ketegasan, hal ini karena femininitas yang melekat sebagai sifat perempuan.

Kaum feminism radikal mengatakan bahwa pembagian kerja seksual mencerminkan adanya dominasi laki-laki. Laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang lebih besar dari pada perempuan untuk mengembangkan diri di sektor publik. Ketidakadilan akses dan kesempatan ini menjadikan perempuan hanya bisa berdiam diri di dalam rumah, dan mengerjakan segala pekerjaan domestik. Ekonomi dan politik didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini membuat perempuan menjadi tergantung pada laki-laki.

j. Perempuan dan Politik

Membicarakan soal perempuan, tidak terlepas dengan peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Terlebih apabila dikaitkan dengan politik. Politik merupakan lembaga yang paling dominan membentuk struktur sosial. Keputusan di bidang apapun berada di tangan lembaga ini. Seperti keputusan yang menyangkut lembaga keluarga, hukum, juga sosial. Tidak terkecuali dalam keputusan ini, peranan dan kedudukan perempuan dalam masyarakat juga ditentukan lembaga politik. Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab perempuan dalam hidup

bermasyarakat tidak terlepas dari peraturan institusi politik (A. Nunuk P. Muniarti, 2004: 136).

Keberadaan perempuan tidak diuntungkan karena sudut pandang dan perlakuan yang tidak adil. Elit politik memandang kaum perempuan sebaiknya diletakkan pada pekerjaan domestik, karena hal itu sesuai dengan kodratnya. Perempuan dikatakan tidak memiliki ketertarikan terhadap politik (jika ada yang berminat tidak diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki), perempuan juga lebih tertarik memikirkan kecantikan diri dari pada persoalan politik, dan perempuan bertugas untuk mengurusi rumah tangga dan mengasuh anak. Stereotipe negatif mengenai ciri khas perempuan dianggap sebagai kodrat yang harus diterima.

Kebijakan politik mengenai partisipasi perempuan mengindikasikan adanya budaya patriarkhi. Dunia politik masih didominasi oleh laki-laki, terutama pada tataran jabatan penting dalam pemerintahan. Semenjak adanya pengarusutamaan gender di setiap lembaga sosial, termasuk politik. Pemerintah membuat peraturan mengenai kuota sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik (parpol), akan tetapi anggota Panja RUU Parpol yang mayoritas laki-laki, memutuskan tidak memasukkan rumusan mengenai kuota minimal 30 persen untuk perempuan.

Menurut Saparinah Sadli (2010: 112), ketakutan atau keraguan anggota parlemen laki-laki mengenai gagasan peningkatan keterwakilan perempuan menunjukkan tiga hal yaitu,

- 1) Mereka menganggap rendah kemampuan dan potensi perempuan dalam politik,
- 2) Mereka tidak memahami bahwa perempuan mempunyai pengalaman berbeda dengan laki-laki yang diperlukan dan berguna dalam suatu proses demokrasi,
- 3) Mereka takut disaingi perempuan jika jumlahnya di partai politik atau lembaga politik seperti DPR sampai 30 persen.

Keputusan Panja RUU Parpol untuk menghapus rumusan minimal kuota 30 persen untuk perempuan, adalah tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip demokrasi, di mana setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, dan suku bangsa.

k. Organisasi Kemahasiswaan dan Kesetaraan Gender

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya (Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita, 2000: 2). Organisasi dibentuk secara formal dan dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Organisasi kemahasiswaan adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan potensi mahasiswa melalui kegiatan di luar jam perkuliahan (ekstrakurikuler), organisasi kemahasiswaan juga menjadi wadah untuk menampung seluruh aspirasi mahasiswa demi

kepentingan bersama, serta bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antaranggota kelompoknya.

Dalam berorganisasi, tentu akan ada usaha-usaha untuk menciptakan suasana yang harmonis, dalam usaha menciptakan suasana tersebut diperlukan adanya organisasi yang ramah gender. Organisasi yang ramah gender menganut prinsip kesetaraan gender, di mana ada kesamaan akses, hak-hak, dan kesempatan bagi laki-laki maupun perempuan untuk ikut aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh suatu organisasi. Menurut McDonald dalam Amin Abdullah (2004: 41), ada empat aspek kunci dalam pengelolaan organisasi menuju kesetaraan gender,

1. Rupa organisasi dalam arti pembagian kekuasaan untuk mengambil keputusan,
2. Keseimbangan antara staf perempuan dengan staf laki-laki khususnya dalam posisi menjadi pengelola dan peran-peran penentu kebijakan,
3. Budaya dan gaya organisasi,
4. Kinerja sehari-hari apakah organisasi tersebut terbuka untuk perempuan atau bahkan terbuka untuk semua orang.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menuju pada kesetaraan gender, yang bertujuan mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan akibat ketidakadilan gender. Instrumen untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam organisasi dapat dilakukan dengan *gender scan*.

Gender scan adalah kesamaan akses dan kontrol terhadap SDM (sumber daya manusia) laki-laki dan perempuan di organisasi, sensitivitas gender dalam pengembangan perencanaan dan kebijakan organisasi, adanya kebutuhan strategi gender, adanya *gender stereotypes*, kesamaan gender di organisasi, hubungan gender dan pembagian kerja berdasarkan perbedaan gender (Elfi Muawanah, 2009: 17).

Dalam menuju organisasi yang ramah gender diperlukan usaha melalui kebijakan organisasi dalam pembagian tugas yang tidak bias gender, menciptakan aturan-aturan yang melindungi perempuan dari stereotipe, diskriminasi, dan pelecehan melalui perilaku verbal maupun nonverbal karena adanya perbedaan gender.

Kebanyakan struktur organisasi masih bersifat hierarkhi, di mana posisi-posisi puncak diduduki oleh kaum laki-laki. Pembuatan keputusan dan kebijakan sering kali dilakukan oleh posisi puncak, sehingga memungkinkan adanya kebijakan yang mengarah pada bias gender. Munculnya bias gender bukan hanya karena laki-laki yang menduduki posisi puncak, tetapi juga karena ketiadaan kesetaraan gender. Meskipun perempuan yang menduduki posisi puncak, tetapi memungkinkan praktik bias gender dalam organisasi apabila tidak dibekali kesadaran akan kesetaraan gender.

Saat ini wacana publik mengenai kesetaraan gender sudah meluas di berbagai sudut kehidupan. Kesadaran akan kesetaraan gender sedang diperjuangkan oleh kaum feminis untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia, dan perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan baik di lingkup

keluarga, masyarakat, organisasi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya.

I. Kemenonjolan Keanggotaan Kelompok

Salah satu faktor yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan gender adalah kemenonjolan keanggotaan kelompok, yaitu perbedaan gender seseorang atau beberapa orang sangatlah tampak dalam kelompok tersebut. Hal yang memengaruhi kemenonjolan gender adalah proporsi wanita dibanding pria dalam suatu organisasi (Taylor, dkk, 2009: 418).

Gender seseorang akan lebih menonjol jika jumlahnya minoritas. Komposisi kelompok yang tidak seimbang menciptakan persepsi stereotipe tentang perilaku kaum minoritas, yang kemudian memunculkan subordinasi dan marginalisasi terhadap kaum minoritas.

Jurusan Teknik Mesin diberi label oleh masyarakat sebagai jurusan maskulin, perempuan yang menuntut ilmu di jurusan tersebut jumlahnya masih sangat sedikit. Itu berarti kesadaran akan kesetaraan gender masyarakat juga masih rendah. Tidak banyak perempuan yang berani memasuki area maskulin seperti jurusan Teknik Mesin, karena mereka tidak mau dianggap menyimpang dari ketentuan masyarakat yang ada.

Meskipun mahasiswa perempuan sebagai kelompok minoritas, mereka tetap berani aktif di Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Mesin FT UNY. Partisipasi perempuan dalam kancah organisasi kemahasiswaan ini dapat sedikit melunturkan pandangan

stereotipe terhadap kaum perempuan sendiri. Perempuan tidak hanya berdiam diri dan menerima mentah-mentah kebijakan yang berlaku. Tetapi mereka berani menampilkan diri di organisasi kemahasiswaannya meski mereka sadar, bahwa budaya patriarkhi masih melekat di masyarakat, dan jumlah mereka jauh lebih sedikit dari pada laki-laki, sehingga kesempatan untuk mendapat peluang yang sama dengan laki-laki juga sangat sedikit.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Sensitivitas Gender pada Aktivitas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi (HIMA DILOGI) Universitas Negeri Yogyakarta Periode 2010.* Penelitian ini dilakukan oleh Arief Budiawan, mahasiswa program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peluang jabatan, kegiatan praktis, dan keputusan politik yang terjadi di HIMA DILOGI tersebut.

Hasil penelitian mengenai sensitivitas gender pada aktivitas organisasi himpunan mahasiswa pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta periode 2010 menunjuk adanya ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Kegiatan-kegiatan HIMA DILOGI seperti makrab, ulang tahun HIMA menunjukkan kedudukan perempuan dalam pembagian kerja selalu ditempatkan dalam pekerjaan-pekerjaan domestik

seperti seksi konsumsi dan bendahara, sedangkan untuk kepemimpinan selalu dijabat oleh kaum laki-laki. Hal ini, disebabkan kebijakan organisasi dalam pemilihan jabatan yang main tunjuk, penunjukkan tersebut telah merugikan kaum perempuan dalam berorganisasi. Dapat dikatakan, bahwa dalam pembagian kerja pada setiap kegiatan-kegiatan praktis HIMA DILOGI tidak memperhatikan kesetaraan gender.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama bertujuan untuk melihat peluang jabatan dan pengambilan keputusan politik antara pria dan wanita di Organisasi Kemahasiswaan. Perbedaan penelitian ini, penelitian Arief Budiawan lebih terfokus pada bagaimana sensitivitas gender pada aktivitas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNY, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bertujuan untuk melihat aplikasi kesetaraan gender di kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Jurusan Teknik Mesin di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Yogyakarta.

- b. *Peran Aktivis Mahasiswa Perempuan dalam Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009.* Penelitian ini dilakukan oleh Anggun Kusuma Wardani, mahasiswi program studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran aktivis mahasiswa perempuan dalam institusi tersebut, serta melihat sejauh mana marginalisasi

perempuan, stereotipe terhadap perempuan, dan subordinasi perempuan dalam aktivitas keorganisasian.

Hasil penelitian mengenai peran aktivis mahasiswa perempuan dalam organisasi BEM yang dilakukan di FISE UNY tahun 2009, menunjukkan keterlibatan kaum perempuan dalam organisasi BEM FISE dapat dikatakan cukup optimal, yaitu terbukti dalam suatu program kerja aktivis perempuan selalu terlibat di dalamnya. Struktur organisasi BEM yang syarat akan budaya patriarkhi masih dijunjung tinggi, sehingga kaum laki-laki lebih superior dari pada perempuan. Peran aktivis perempuan masih kurang maksimal, karena struktur organisasi BEM FISE masih didominasi oleh kaum laki-laki. Mulai dari ketua umum sampai ketua perdivisi cenderung masih didominasi laki-laki. Bias gender dalam organisasi BEM FISE ditunjukkan adanya stereotipe (pelabelan) dan subordinasi, yang menempatkan perempuan pada jabatan tertentu yaitu sekretaris, bendahara dan seksi konsumsi.

Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggun Kusuma Wardani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama melihat sejauh mana stereotipe terhadap perempuan dan subordinasi perempuan dalam aktivitas keorganisasian. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian Anggun Kusuma Wardani melihat bagaimana peran aktivis perempuan dalam Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih melihat bagaimana akses dan kesempatan yang diperoleh aktivis perempuan

untuk menduduki jabatan penting, serta bagaimana aplikasi kesetaraan gender dalam kebijakan dan struktur Organisasi Kemahasiswaan Jurusan Teknik Mesin.

c. *Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa (Studi Kasus Desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara).*

Penelitian ini dilakukan oleh Supartinah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana partisipasi perempuan dalam struktur desa Pakelen, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara.

Hasil penelitian mengenai partisipasi perempuan dalam struktur organisasi desa Pakelen menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Dalam struktur organisasi desa Pakelen baik formal maupun nonformal cenderung didominasi oleh laki-laki. Hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam struktur organisasi, dan hanya ada di organisasi nonformal. Sosialisasi mengenai kesetaraan gender pernah diadakan, namun belum memberikan perubahan, karena mereka hanya mengikuti sosialisasi tersebut tanpa mengaplikasikannya. Kesempatan yang dimiliki perempuan belum seimbang dengan yang dimiliki laki-laki. Dalam kepemimpinan organisasi yang ada di desa Pakelen masih mengutamakan laki-laki.

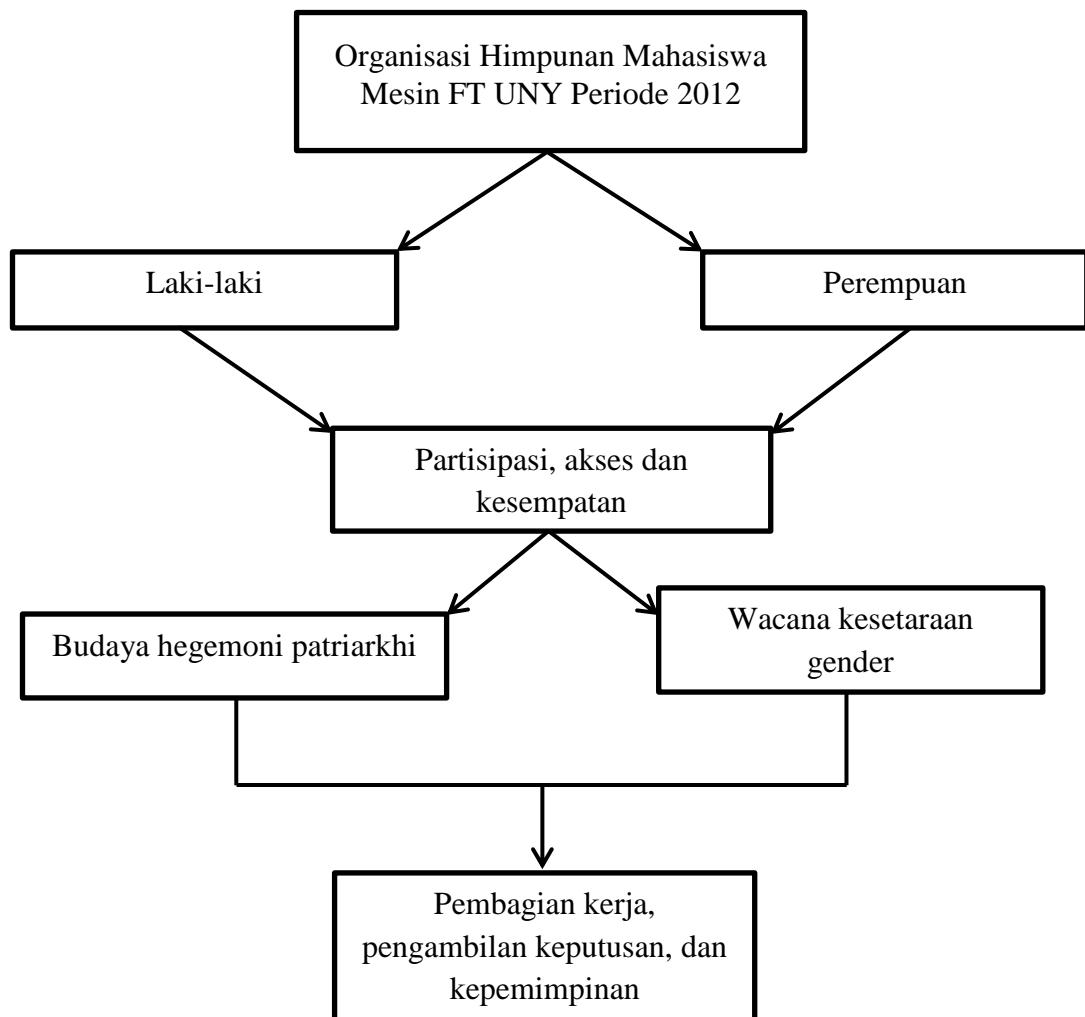
Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Supartinah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama melihat kesempatan dan keterlibatan perempuan dalam struktur desa Pakelen.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Supartinah hanya melihat sejauh mana partisipasi perempuan dalam struktur organisasi. Penelitian yang dilakukan peneliti tidak hanya melihat pertisipasi perempuan dalam organisasi, tetapi juga melihat bagaimana aplikasi kesetaraan gender dalam kepengurusan organisasi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dijadikan pijakan atau pedoman dalam menentukan tujuan penelitian, hal ini berfungsi agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jurusan Teknik Mesin merupakan jurusan yang diberi label oleh masyarakat sebagai jurusan maskulin, sehingga perempuan yang mengambil jurusan tersebut dianggap tabu. Oleh sebab itu, perempuan yang mengambil jurusan tersebut sangat sedikit jumlahnya dibanding dengan jumlah mahasiswa pria. Meskipun jumlah mahasiswa perempuan terhitung sedikit, mereka tetap berani tampil di Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Mesin FT UNY. Ketidakseimbangan jumlah aktivis laki-laki dengan jumlah aktivis perempuan menciptakan kondisi yang rawan akan ketidaksetaraan gender, seperti stereotipe, marginalisasi, pembagian kerja, dan akses perempuan untuk menjadi pengurus atau pemimpin, bukan sekedar menjadi anggota dari organisasi tersebut.



Bagan 1. Kerangka Pikir